BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informmasi dan komunikasi (TIK) saat ini telah menjadi tren hampir di semua lini, termasuk juga di institusi pemerintahan (Criado et al., 2013). Untuk memenuhi kewajibannya sebagai pelayan publik, lembaga pemerintah melakukan reformasi birokrasi dengan memanfaatkan TIK untuk mendapatkan, memproses, memanipulasi, menyimpan dan melaporkan data secara efisien dan andal melalui layanan *e- government* (Sitasi). Transformasi digital telah mengubah penyelenggaraan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Namun, penggunaan media digital tidak serta-merta mencerminkan implementasi *Open Government*, yang menuntut terwujudnya transparansi, partisipasi, dan kolaborasi (Gil-Garcia, Gascó, et al., 2020).

Dengan adanya sistem tranformasi digital, sangat dubutuhkan peran aktif masyarakat sebagai warga negara. Arus informasi yang melimpah di era modern ini memicu masyarakat menjadi lebih kritis terhadap kinerja pemerintahan dan menuntut peningkatan transparansi serta keterbukaan (Isaura, 2020). *Good governance* atau pemerintahan yang baik telah menjadi agenda internasional dan sering digaungkan oleh masyarakat (Sumarto, 2009). Oleh karena itu, arus informasi yang melimpah mendorong tuntutan akan transparansi, keterbukaan, dan peningkatan layanan publik untuk memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah.

Sebagai langkah nyata dalam peningkatan transparansi pemerintahan serta partisipasi publik, *Open Government Partnership* (OGP) secara resmi dideklarasikan pada September 2011 di sela pertemuan majelis umum PBB. Inisiatif ini diprakarsai oleh delapan negara: Indonesia, Brazil, Mexico, Norwegia, Inggris, Afrika Selatan, Filipina, dan Amerika Serikat. Deklarasi ini merupakan upaya global untuk membentuk pemerintahan yang lebih terbuka, efektif, dan akuntabel, serta untuk memberdayakan masyarakat dan menciptakan good governance. Pemerintahan terbuka juga dipuji sebagai paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan (OECED, 2016).

Open government juga berfungsi untuk membuka ruang kepada warga negara agar lebih terinformasi dan terlibat aktif dalam pemerintahan dengan memanfaatkan

pesatnya perkembangan TIK (Schnell Sabina, 2020). Dalam konteks ini, penggunaan media sosial menjadi krusial, karena teknologi ini berfungsi sebagai jembatan untuk komunikasi yang lebih langsung dan transparan antara pemerintah dan masyarakat. Adopsi media sosial, yang juga dikenal sebagai "Mediatisasi Sosial" dianggap sebagai faktor penting dalam transformasi digital dan implementasi pemerintahan terbuka menggunakan media sosial (Lim et al., 2022a). Media sosial bukan sekadar media penyebaran informasi tetapi mengubah pola hubungan pemerintah dan masyarakat dari komunikasi satu arah menjadi komunikasi interaktif (Dunan, 2020)

Penggunaan media sosial di sektor publik dipandang sebagai inovasi teknologi dan agen transformasi (Chun & Reyes, 2012), serta membuka peluang baru yang belum pernah ada sebelumnya (Lee & Kwak, 2012). Media sosial, dengan sifatnya yang terbuka dan partisipatif, berfungsi sebagai platform penting untuk interaksi antara pemerintah, pemerintah dan masyarakat, serta antara lembaga pemerintah dan sektor swasta (Sandoval-Almazan & Gil-Garcia, 2012). Penggunaan media sosial dalam pemerintahan terbuka bergantung pada akses internet masyarakat (Khan, 2017). Media sosial dengan tujuan ekspresif sangat menonjol di ruang publik (Lim et al., 2022b). Media sosial berperan dalam meningkatkan transparansi, komunikasi pemerintah, dan implementasi pemerintahan terbuka (Gil-Garcia, Gasco-Hernandez, et al., 2020) Di antara berbagai platform media sosial tersebut, *YouTube* memiliki karakteristik yang memungkinkan penyampaian informasi secara lebih komprehensif melalui format audio visual dan interaksi langsung.

Tren peningkatan konektivitas juga terjadi di Indonesia. Hasil Survei Internet Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2026 menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai sekitar 235,26 juta jiwa atau 81,72% dari total populasi sekitar 287,88 juta jiwa. Berdasarkan kelompok generasi, tingkat penetrasi internet tertinggi terdapat pada generasi milenial sebesar 90,34%, diikuti Generasi Z sebesar 89,02%. Data tersebut menunjukkan bahwa internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, terutama pada kelompok usia muda dan produktif (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2026a). Perkembangan ini mencerminkan peluang dan tantangan bagi pemerintah dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi, dan pelayanan publik (Meijer, 2013).

Implementasi pemerintahan terbuka melalui media sosial seharusnya tidak hanya terbatas pada tingkat nasional. Diperlukan kajian yang lebih mendalam, terutama untuk memahami sejauh mana prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat diterapkan secara efektif di tingkat lokal dan daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki struktur pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah, mencakup tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Struktur ini berfungsi dalam kerangka otonomi daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, hal ini memungkinkan daerah untuk mengatur urusan pemerintahan sendiri sesuai prinsip desentralisasi asimetris (Triwahyuningsih, 2021). Status keistimewaan menjadikan hubungan pemerintah dan masyarakat di DIY memiliki karakteristik yang berbeda dibanding daerah lain sehingga praktik komunikasi publik juga perlu dipahami dalam konteks tersebut.

Dengan mengacu pada prinsip otonomi daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menerapkan sistem pemerintahan yang unik dan kemudian dikenal sebagai istimewa (Annafie & Nurmandi, 2017). Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berakar dari sejarah dan asal-usul wilayah tersebut. Keistimewaan ini diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, yang disahkan oleh pemerintah pusat untuk menetapkan dan mengelola tambahan kewenangan yang terkait dengan status keistimewaan tersebut. (Kariem, 2018). Untuk membantu tugas gubernur DIY, dalam hal penyusunan kebijakan, melakukan perencanaan, dan melakukan pengendalian atas urusan keistimewaan kemudian dibentuklah sebuah lembaga khusus yang bertugas menangani masalah tersebut sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) PERDAIS Nomor 1 Tahun 2017, yang kemudian dinamakan Paniradya Kaistimewan.

Sebagai organisasi pemerintah daerah (OPD) yang baru dibentuk dan bertugas menangani isu-isu kompleks terkait keistimewaan, Paniradya menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola dan menyampaikan informasi secara efektif. Penelitian yang dilakukan oleh Iranda Yudhatama (2017) dalam menjalankan komunikasi politik di area perencanaan keistimewaan ditemukan gejala terjadinya defisit demokarsi.

Hasil penelitian mengungkapkan beberapa temuan penting, yaitu:

(1) Komunikasi politik yang terjalin antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan masyarakat cenderung bersifat top-down dan teknokratis;

(2) Partisipasi masyarakat relatif rendah, yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak memberikan ruang yang cukup untuk partisipasi public.
(3) Masyarakat memiliki persepsi bahwa keterlibatan mereka dalam proses perencanaan dan penganggaran tidak diperlukan, karena mereka mempercayai kearifan Sultan selaku Gubernur DIY (Yudhatama, 2017).

Merujuk pada temuan penelitian tersebut, Paniradya Kaistimewan berupaya memperbaiki sistem komunikasi dan partisipasi publik melalui pemanfaatan *YouTube* sebagai media komunikasi pemerintah. Upaya ini merupakan implementasi pendekatan Gov 2.0 yang memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Namun, efektivitas *YouTube* dalam merepresentasikan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka masih memerlukan pembuktian empiris. Dalam perspektif komunikasi deliberatif, media sosial dapat menjadi ruang dialog yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi, memberikan umpan balik, serta terlibat dalam diskusi kebijakan. Kondisi tersebut sejalan dengan prinsip pemerintahan terbuka yang menekankan ketersediaan informasi, transparansi, partisipasi, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi (Ruvalcaba-Gomez & Criado, 2023). Melalui karakteristik interaktifnya, *YouTube* berpotensi memperkuat keterlibatan warga negara dan mendukung terwujudnya komunikasi deliberatif dalam penyelenggaraan pemerintahan (Lux Wigand, 2011).

Penyampaian informasi mengenai kebijakan dan program-program dalam lima bidang utama keistimewaan DIY yaitu pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang dapat dimaksimalkan melalui media sosial. Media sosial terbukti efektif dalam mempercepat transmisi informasi serta tanggapan publik, memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan mendukung pemberdayaan masyarakat secara lebih luas (Lin & Kant, 2021). Oleh karena itu, media sosial menjadi komponen kunci dalam mendukung kebijakan strategis jangka panjang untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi DIY.

Pemilihan media sosial secara umum, dan saluran *YouTube* Resmi Paniradya Kaistimewan secara khusus, sebagai fokus penelitian ini didasarkan pada sejumlah faktor yang mendasarinya. Pertama, *YouTube* menempati peringkat pertama sebagai media

sosial yang paling sering dikases oleh para pengguna internet dengan tingkat penetrasi 65,14 %, kemudian disusul oleh *Facebook*, dan Instagram (APJII, 2026). Kedua, *YouTube* Memiliki kemampuan menyampaikan Informasi secara visual dan menarik. 95% orang lebih mengingat pesan ketika disajikan dalam bentuk video, dibandingkan dengan ketika membaca teks, daya ingat hanya 10% (Mayer, 2002). Ketiga, terjalinnya komunikasi dan partisipasi publik. Video live streaming di *YouTube* memungkinkan audiens untuk berinteraksi langsung dengan penyiar melalui fitur chat, sehingga meningkatkan partisipasi publik (Lovejoy & Saxton, 2012).

Keempat, *YouTube Analytics* memungkinkan pengguna untuk melacak berbagai matrix yang membantu memahami bagaimana audiens berinteraksi dengan konten (Mergel, 2016). Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, pemilihan *YouTube* sebagai saluran komunikasi utama oleh Paniradya Kaistimewan dianggap sebagai strategi yang efektif dan efisien untuk mencapai jangkauan luas, meningkatkan keterlibatan publik, dan memaksimalkan hasil analisis komunikasi, dengan tetap menekan biaya produksi sehingga lebih efisien.

Dengan adanya saluran *YouTube* resmi Paniradya Kaistimewan, diharapkan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi yang terpercaya, mudah dijangkau, dan terkini mengenai penyelenggaraan urusan keistimewaan. Tingkat jangkauan komunikasi kanal tersebut dapat dilihat melalui jumlah subscriber dan viewer. Hingga saat ini, saluran *YouTube* Paniradya Kaistimewan telah memiliki 165 ribu subscriber, 28,836,638 total penayangan *(viewer)*, serta 623 konten yang dipublikasikan sejak 14 Agustus 2019. Data tersebut menunjukkan bahwa kanal *YouTube* Paniradya Kaistimewan memiliki jangkauan komunikasi yang luas. Namun, tingginya jumlah subscriber dan viewer belum dapat dijadikan indikator bahwa komunikasi yang berlangsung telah merepresentasikan prinsip-prinsip *Open Government*. Ukuran kuantitatif tersebut tidak secara otomatis menunjukkan adanya transparansi, partisipasi publik yang bermakna, maupun komunikasi deliberatif antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang menganalisis kualitas komunikasi, bentuk partisipasi publik, serta pola interaksi yang terjadi dalam program Rembag Kaistimewan untuk memahami sejauh mana praktik komunikasi dalam program Rembag Kaistimewan mencerminkan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka.



Gambar 1. Tampilan Halaman Muka Saluran YouTube Resmi Paniradya Kaistimewan

Sumber : Dokumen Pribadi

Dalam saluran *YouTube* Paniradya Kaistimewan, instrumen penelitian yang digunakan adalah program Rembag Kaistimewan, yaitu media penyebarluasan informasi berbentuk *live talkshow* yang membahas berbagai isu keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Informasi yang disampaikan meliputi isu-isu keistimewaan yang sedang berkembang, kegiatan keistimewaan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta berbagai kebijakan terkait urusan keistimewaan. Program ini menghadirkan narasumber yang kompeten dan memberikan ruang dialog interaktif melalui fitur *live streaming*, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi sekaligus menyampaikan pertanyaan secara langsung. Selain itu, Rembag Kaistimewan juga menerapkan prinsip inklusivitas dengan menghadirkan juru bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas.

Komunikasi publik melalui program Rembag Kaistimewan oleh Paniradya Kaistimewan menunjukkan adanya upaya transformasi komunikasi publik ke ranah digital. Akan tetapi, keberadaan media digital tersebut belum secara otomatis menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *Open Government* telah terimplementasi secara optimal. Komunikasi digital pemerintah tidak hanya diukur dari kemampuannya menyampaikan informasi, tetapi juga dari kemampuannya membangun ruang dialog, mendorong partisipasi publik, memfasilitasi pertukaran gagasan, serta menghasilkan umpan balik yang berkontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Atas dasar itu, penelitian ini tidak berupaya menilai keberhasilan kanal *YouTube* Paniradya berdasarkan jumlah subscriber atau viewer, melainkan mengevaluasi kualitas komunikasi publik yang berlangsung dalam program Rembag Kaistimewan sebagai ruang dialog digital antara pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu yang membahas komunikasi deliberatif, ruang publik digital, media sosial pemerintah, dan *Open Government*, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana praktik komunikasi dalam program tersebut merepresentasikan prinsip-prinsip *Open Government*, sehingga celah penelitian tersebut menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada penggunaan media sosial pemerintah sebagai sarana diseminasi informasi atau komunikasi digital. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus menempatkan program dialog digital pemerintah daerah sebagai ruang publik yang dianalisis melalui perspektif komunikasi deliberatif dan *Open Government*.



Gambar 2. Partisipasi Masyarakat Dalam kolom Komentar Program Rembag Kaistimewan
Sumber : Dokumen Pribadi

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini tidak bertujuan membuktikan bahwa Rembag Kaistimewan telah berhasil mengimplementasikan pemerintahan terbuka, melainkan mengeksplorasi bagaimana praktik komunikasi yang berlangsung dalam program tersebut merepresentasikan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka melalui transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan komunikasi deliberatif dalam konteks keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.2 Rumusan Masalah

Fokus rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, “Bagaimana praktik komunikasi publik dalam program Rembag Kaistimewan melalui saluran *YouTube* resmi Paniradya Kaistimewan mencerminkan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta?"

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana praktik komunikasi publik yang berlangsung dalam program Rembag Kaistimewan melalui saluran *YouTube* resmi Paniradya Kaistimewan mencerminkan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan kajian komunikasi pemerintahan digital, khususnya mengenai hubungan antara ruang publik digital, komunikasi deliberatif, dan implementasi prinsip-prinsip pemerintahan terbuka pada pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga akan menelaah bagaimana saluran digital dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam menjalankan proses pemerintahan terbuka.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Paniradya Kaistimewan dalam mengembangkan praktik komunikasi publik digital melalui program Rembag Kaistimewan, khususnya dalam memperkuat transparansi, partisipasi masyarakat, komunikasi deliberatif, dan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka.